

Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur

Abby Alfianda^{a, 1*}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ abby.alfianda@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Maret 2022;
Revised: 20 Maret 2022;
Accepted: 25 Maret 2022.

Kata-kata kunci:
Pendidikan Politik;
Semangat Demokrasi;
Generasi Muda.

Keywords:

Political Education;
Spirit of Democracy;
Younger Generation.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendidikan politik dan implementasi dari pendidikan politik bagi generasi muda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, *tape-recorder*, dan catatan lapangan. Adapun partisipan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, dan Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur. Pelaksanaan pendidikan politik sebetulnya sudah dilaksanakan setiap satu tahun yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan generasi muda. Namun realitanya, pendidikan politik yang dilaksanakan belum dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan semangat demokrasi generasi muda di Kabupaten Belitung Timur.

ABSTRACT

The Role of Political Education in Increasing the Democratic Spirit of the young generation in East Belitung District. The purpose of this research is to know the mechanism of political education and the implementation of political education for the younger generation. The method used in this study is semi-structured interviews with qualitative descriptive research designs. The instruments used in this study are interview guidelines, tape recorders, and field records. The candidates in this study are the Head of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency, Head of Ideology and National Insight Development of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency, Head of Domestic Politics of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency, and Head of Sub-Division of Political Culture Education and Facilitation of Election of The National Unity and Political Agency of East Belitung Regency. The implementation of political education has actually been carried out every year which involves sharing elements of society and the younger generation. But the reality is, political education implemented has not been able to influence the increasing democratic spirit of the younger generation in East Belitung Regency.

Copyright © 2022 (Abby Alfianda). All Right Reserved

How to Cite : Alfianda, A. (2022). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 109–119. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1662>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Permasalahan politik di Indonesia sekarang ini sering mengalami pasang surut. Pasca reformasi, semangat demokrasi generasi muda dalam ranah politik mengalami gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas dan kuantitas politik. Kita ambil contoh dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Di beberapa daerah di Indonesia tingkat golongan putih (golput) yang di akibat oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang dicalonkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sering juga dinodai oleh penggunaan politik uang (*money politics*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seorang calon.

Lingkungan belajar yang efektif akan mengembangkan suasana yang baik, tenang, dan nyaman, dan pendidikan akan mempengaruhi perkembangan nilai-nilai materi, estetika, dan keterlibatan otentik yang terbentuk secara alami oleh lingkungan (Anggraeni et al., 2022). Melihat fenomena tersebut, perlu adanya tindakan serius dari pihak pemerintah dalam menangani rendahnya semangat demokrasi di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Saat ini, pemerintah telah menyelenggarakan pendidikan politik kepada generasi muda melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Pendidikan politik merupakan suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar nantinya mereka dapat berpartisipasi secara maksimal di dalam penyelenggaraan sistem politik dan paham akan kedaulatan rakyat atau demokrasi itu sendiri.

Dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Hal tersebut dikarenakan generasi muda saat ini cenderung cuek, acuh, dan tidak peduli terhadap proses politik atau perkembangan demokrasi di negara ini. Peran pemerintah juga dirasa masih kurang di dalam meningkatkan semangat demokrasi pada generasi muda. Faktor tersebut menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus segera ditangani. Mengingat masih rendahnya semangat demokrasi serta kesadaran generasi muda terhadap haknya sebagai warga negara. Generasi muda saat ini hanya cenderung aktif dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian terhadap perkembangan politik itu hanya sebatas di media sosial saja dan tidak disertai dengan sebuah tindakan. Hal tersebut membuktikan bahwa semangat generasi muda saat ini hanya berada di permukaan saja, belum ada semangat yang besar untuk terlibat dalam pelaksanaan demokrasi di negeri ini.

Penanaman nilai-nilai luhur kepada generasi muda menjadi suatu keniscayaan, mengingat posisi dan fungsi generasi muda yang begitu vital dalam mencapai cita-cita dan harapan bangsa. Apalagi saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi bonus demografi dengan jumlah penduduk yang besar tergolong masih muda (Anggraeni et al., 2021). Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol merupakan sarana dalam membentuk karakter kepemimpinan dan semangat demokrasi dalam politik pada generasi muda. Bila kita melihat potensi yang dimiliki oleh generasi muda, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik ini sangat penting untuk dilaksanakan dan disampaikan sejak dini serta dipahami oleh masyarakat Indonesia terutama generasi muda agar nantinya rakyat Indonesia tidak menjadi objek politik saja namun berperan sebagai subjek politik. Dengan dilaksanakannya pendidikan politik ini, diharapkan generasi muda menjadi “melek politik” dan rakyat akan sadar akan hak dan kewajibannya, kritis, sadar hukum, aktif, dan kreatif serta konstruktif.

Berdasarkan atas permasalahan generasi muda dalam rendahnya semangat demokrasi, pemerintah harus bekerja sama dengan dinas terkait atau swasta dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan politik sehingga dapat meningkatkan semangat demokrasi generasi muda. Bakesbangpol memaparkan bahwa pendidikan politik ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan pembelajaran kepada generasi muda, memberikan motivasi serta pemahaman akan pentingnya peran generasi muda dalam proses politik di negaranya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yakni kurangnya minat generasi muda dalam mengikuti kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus berupaya mendukung kegiatan pendidikan politik agar terus berjalan guna meningkatkan semangat demokrasi generasi muda. Pendidikan politik bagi generasi muda juga diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Menurut George Edward III (1980) yang baperspektif *Top Down*, beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah masalah yang krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Dia menegaskan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif dari pembuat kebijakan, maka kebijakan itu tidak bisa berjalan dengan sukses. Implementasi kebijakan publik biasanya tidak berjalan dengan sukses dikarenakan kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pada dasarnya tujuan dan sasaran kebijakan harus terlebih dahulu diinformasikan melalui komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan target atau kelompok sasaran sehingga nantinya jika kelompok sasaran sudah memahami kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, efektifitas dari implementasi diperkirakan akan menjadi lebih baik. Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan pendidikan politik merupakan masalah yang krusial pada kebijakan publik yang dimana implementasi kebijakan tersebut merupakan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat dilihat dari berhasil tidaknya implementasi, tetapi dalam hal ini, implementasi kebijakan tidak hanya bisa dipandang dari bagaimana perumusan yang baik tetapi tentang bagaimana pelaksanaannya, dimana setiap jajaran harus terlibat dalam suatu kebijakan dan saling berkoordinasi satu sama lain agar implementasi menjadi lebih baik (Anggraeni et al., 2020; Tuasamu, 2022).

Betapa pentingnya sebuah implementasi kebijakan pendidikan politik untuk semua warganegara Indonesia, seperti halnya implementasi Pendidikan secara umum mencakup Pendidikan yang betapa pentingnya diimplementasikan melalui bidang lain seperti bidang olahraga yang sangat erat kaitannya dengan Pendidikan politik dimasa kini (Paramitha et al., 2022a). Maka menjadi harapan kita semua agar pendidikan politik ini dapat diterapkan di negara Indonesia yang bersumber pada aspirasi yang digali dari kepribadian dan kekayaan spiritual bangsa sendiri, dan telah disepakati secara nasional demi tegaknya Republik Indonesia. Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, diharapkan nantinya pemerintah harus bisa mengimplementasikan segala kebijakan dari pendidikan politik ini dengan menyaring dan menilai ulang segala kebijakan pendidikan politik, serta pemerintah harus dapat menolak semua ideologi dan nilai-nilai asing yang sebetulnya tidak sesuai dengan aspirasi dan kepribadian bangsa kita. Affandi (1996:27) menyatakan bahwa pendidikan politik dianggap penting oleh hampir semua masyarakat dan dianggap sebagai penentu perilaku politik seseorang. Dari pernyataan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik. Brownhill dan Smart (1989), juga berpendapat bahwa pendidikan politik adalah proses pendidikan untuk membina siswa agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang *bias* maupun isu yang *controversial*. Adanya pendidikan politik ini diharapkan, kita mampu menanggulangi segala ancaman dan serbuan kekuatan atau pengaruh-pengaruh dari negara luar sehingga bisa tergalang penalaran sehat mengenai bela negara dan nasionalisme yang sehat dan semangat demokrasi yang tinggi dalam politik (Gultom, 2022).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa Pemerintah harus membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah harus begitu ketat dalam menerapkan kebijakan dan amandemen baru (Borah 2012). Penelitian ini berfokus pada pemerintah india yang membuat berbagai kebijakan pendidikan dan amandemen di dalam negaranya (Paramitha et al., 2022b). Sementara penelitian lain menyatakan bahwa penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kemajuan dan kualitas

pendidikan terhadap aspek politik yang mendasarinya (Wales, dkk. 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, akan mendeskripsikan atau menjelaskan pelaksanaan pendidikan politik dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda yang dikaitkan dengan penelitian dari (T5) dimasa pandemic Covid-19 (Paramitha, Hasan, Ilsa, et al., 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pendidikan politik pada generasi muda dan untuk mengetahui implementasi dari pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda agar dapat memiliki semangat untuk berpartisipasi aktif dalam segala proses kegiatan demokrasi di negaranya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan semangat demokrasi. Karena pada dasarnya, Pendidikan politik mensyaratkan mengandung unsur-unsur bernuansa moral. Misalnya ketaatan terhadap hukum atau aturan main, mengagungkan kepentingan publik, memproses kebijakan secara prosedural, pro rakyat banyak, penuh keteladanan, pencerahan publik, dan mengusung visi serta program yang populis. Pendidikan politik memiliki muatan politis, meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Dalam proses demokrasi sekarang, pendidikan politik sangat diperlukan karena adanya tuntutan-tuntutan demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi sering memunculkan banyak ketidakstabilan, namun demokrasi juga memberikan kemungkinan-kemungkinan baru serta harapan baru yang menyenangkan dalam dunia politik di Indonesia. Karena sejatinya, pendidikan politik ini tidak hanya ditujukan kepada perubahan sikap-sikap politik perorangan saja, akan tetapi juga untuk mendukung usaha-usaha dalam memperbaharui dan mendinamisir institusi-institusi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga politik. Bangsa kita memilih bentuk demokrasi sebagai wujud pemerintahan dan sebagai asas dasar bagi penataan pemerintahan, karena demokrasi diharapkan dapat memberikan jaminan berupa kebebasan manusia untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya sendiri.

Politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warganegara untuk membicarakan dan mewujudkan sebuah kebaikan bersama. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam bukunya Ramlan Surbakti (1992-2) dia melihat politik sebagai suatu asosiasi warganegara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ikhwil yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Aktivitas yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari pada aktivitas urusan yang menyangkut kepentingan swasta. Dalam pengertian politik tersebut mengandung tujuan dan etik masyarakat yang sangat jelas. Berpolitik disini ialah membicarakan dan merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan ikut serta dalam upaya mengejar tujuan bersama.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory*, teori politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *Valuational*, yang merupakan teori-teori yang mengandung nilai moral dan norma politik, di mana dalam teori ini segalanya harus dipertimbangkan secara baik buruk atau kosekuensinya dan *Non-Valuational*, yang merupakan teori-teori yang membahas fakta-fakta politik tanpa mempersoalkan nilai moral maupun norma. Teori ini memberikan gambaran dan perbandingan fenomena politik dalam kehidupan nyata.

David Easton melihat kehidupan politik sebagai satu sistem tingkah laku yang beroperasi di dalam dan mereaksi terhadap lingkungan sosialnya, seraya menyajikan alokasi nilai-nilai yang mengikat (Kartini Kartono, 1996). Dalam sistem politik unsur yang paling penting adalah pembagian nilai-nilai terutama nilai kesejahteraan, keadilan dan keamanan bagi setiap warganegara. Dengan begitu politik sangat erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan pemerintah, yang secara normatif harus bersih dan adil. K.W Deuttsch juga berpendapat mengenai politik (Kartono, 1996) dia mengatakan bahwa politik dan pemerintah itu pada esensinya tampil sebagai proses-proses pengendalian dan pengordinasian usaha-usaha insani dalam mencapai beberapa perangkat tujuan. Satu kelompok akan

muncul apabila berlangsung relasi-relasi yang berulang-ulang atau terus-menerus diantara individu dengan individu lain, kemudian diorganisir cukup baik untuk mendorong terjadinya aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan, khususnya tujuan-tujuan politik.

Demokrasi merupakan sesuatu yang penting bagi institusi pemerintah, dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum yang bebas. Kriteria yang membedakan gagasan demokrasi adalah sikap terhadap manusia. Sikap dasar ini yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln sebagai berikut: Karena aku tidak ingin menjadi budak dan aku tidak ingin menjadi tuan. Demikianlah demokrasi menurutnya, apapun yang berbeda dari gagasan itu sampai pada tingkat yang ekstrem, bukanlah demokrasi. (Ketchum, 2004).

Masyarakat menciptakan demokrasi, sejatinya demokrasi merupakan hasil dari rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Untuk memahami hakekat demokrasi kita harus mengujinya sebagaimana yang ditampilkan di beberapa belahan dunia. Demokrasi tampak pada masyarakat yang menciptakannya pada prinsip-prinsip hidup yang mereka miliki, karena pada dasarnya, demokrasi merupakan sebuah produk yang dihasilkan langsung dari seluruh warganya. Tidak ada satupun masyarakat demokrasi yang mencapai kesempurnaan tanpa mengubah cita-citanya menjadi sebuah kenyataan. Demokrasi dapat menyerap pemikiran dan perilaku seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi sebenarnya dapat membahayakan, tetapi sebagian lagi bermanfaat, dan terkadang menyakitkan, dari pengalaman inilah orang belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang pada gilirannya menjadi masyarakat yang kaya dan penuh makna.

Demokrasi sudah menjadi sebuah paradigma dalam bahasa komunikasi dunia yang berkaitan dengan suatu sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Oleh sebab itu, menurut Ni^{matul} Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi. Seperti dapat diketahui dari penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat.

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*); menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*); menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*); membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*); mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku dan Menjamin tegaknya keadilan.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode wawancara semi-terstruktur. Pada penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi dalam pelaksanaan pendidikan politik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, tape recorder, dan catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dialami, dilihat, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan data. Adapun fokus penelitian ini dari topik yang telah disebutkan adalah penyelenggaraan pendidikan politik dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda di Kabupaten Belitung Timur. Setelah itu peneliti melakukan survei pendahuluan untuk memastikan bahwa fokus penelitian tersebut ada data lapangannya. Pada penelitian ini, peneliti datang langsung ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur untuk mencari informasi terkait topik yang hendak diteliti. Kemudian peneliti melakukan pengembangan instrument dengan terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu sudah memiliki beberapa

pedoman yang dijadikan sebagai alat bantu mengumpulkan data. Peneliti selanjutnya melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur. Peneliti mengidentifikasi sumber data yang didapat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur untuk nantinya dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Kemudian peneliti melakukan penyajian data yang diperoleh untuk mengkategorisasikan menurut rumusan masalah dalam pelaksanaan pendidikan politik. Terakhir peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini berjumlah empat orang, dimana yang menjadi narasumber pertama yaitu, Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, narasumber kedua yaitu, Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, narasumber yang ketiga yaitu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur, dan narasumber yang keempat yaitu, Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pelaksanaan Program Pendidikan Politik. Hasil wawancara. Pertanyaan: Bagaimana mekanisme pelaksanaan program pendidikan politik yang dilakukan oleh Bakesbangpol? Apakah ada tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pendidikan politik ini? Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: “Mekanisme dalam kebijakan pendidikan politik biasanya dapat dibuat dalam standart operation prosedur (SOP), Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda terdapat tiga mekanisme dalam pelaksanaan pendidikan politik: Pertama dengan pengetahuan, morality. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif), ketiga berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan.”

Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: “Sebenarnya tahapan dalam pendidikan politik ini terdiri dari; satu, pemerintah memberikan fasilitas kepada generasi muda dalam pendidikan politik, kedua dengan sosialisasi bantuan politik, ketiga, dengan Website dan Media sosial, dan yang terakhir dengan sosialisasi pemilihan umum.” Sesuai dengan teori George Edward III (1980), yang menyatakan bahwa tanpa adanya implementasi yang efektif dari pembuat kebijakan, maka kebijakan itu tidak bisa berjalan dengan sukses. Oleh karena itulah, mekanisme dari program pendidikan politik ini harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari pendidikan politik itu sendiri, sehingga nantinya implementasi dari kebijakan pendidikan politik dapat berjalan dengan sukses.

Mekanisme program pendidikan politik merupakan suatu tata cara atau teknik dalam menanamkan dan membentuk nilai-nilai politik yang terdapat dalam diri setiap warga negara. Mekanisme dalam kebijakan pendidikan politik biasanya dapat dibuat dalam standart operation prosedur (SOP), SOP ini nantinya digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan program pendidikan politik. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda terdapat tiga mekanisme dalam pelaksanaan pendidikan politik: Pertama dengan pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik. dalam istilah lain sering disebut *cognitif morality*. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap (afektif). Pada mekanisme ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Sedangkan mekanisme ketiga berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah seseorang memperoleh pendidikan politik (Paramitha, Hasan, Anggraeni, et al., 2021).

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan pendidikan politik, yaitu: pertama, memberikan Fasilitas Pendidikan Politik untuk Generasi Muda. Dalam hal ini pemerintah harus memberikan fasilitas kepada generasi muda dalam pendidikan politik ini, agar nantinya generasi muda tersebut dapat menjadi

individu yang mempunyai kesadaran penuh sehingga dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi dalam politik, misalnya mengikuti pencoblosan dalam pemilihan umum. Kedua, sosialisasi Bantuan Politik. Sosialisasi bantuan politik merupakan bagian dari Pendidikan politik oleh Partai Politik hal ini tercantum dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam sosialisasi bantuan politik ini, 60% dana dialokasikan untuk pendidikan politik, untuk kepentingan kader dan masyarakat umum, seperti untuk kepentingan seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop.

Ketiga, website dan Media sosial. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat pada saat sekarang ini, tentunya dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk melakukan suatu inovasi yaitu dengan cara memberikan pendidikan politik melalui media sosial facebook, twitter, Instagram maupun platform media sosial yang lainnya. Perkembangan informasi dan teknologi ini tentunya dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada setiap orang, khususnya generasi muda. Dengan tersebarnya informasi di berbagai media sosial tersebut, diharapkan pelaksanaan pendidikan politik dapat berjalan lancar dan tentunya dapat meningkatkan semangat generasi muda dalam berdemokrasi di negaranya. Keempat, Sosialisasi Pemilihan Umum. Salah satu bentuk pendidikan politik yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur yaitu pendidikan politik yang berkerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur. Sosialisasi pemilihan umum ini sebenarnya memiliki tujuan untuk memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui segala tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Belitung Timur. Sosialisasi ini juga sekaligus bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah bagi masyarakat yang memiliki hak konstitusinya sebagai warga negara.

Implementasi Program Pendidikan Politik. Hasil wawancara. Pertanyaan: Bagaimanakah implementasi dari pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda? Apakah implementasi dari program pendidikan politik ini sangat penting? Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: "Implementasi sendiri merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan politik dengan cara langkah administratif maupun dengan politik itu sendiri. Implementasi dalam program pendidikan politik merupakan tahap penting dalam kebijakan pendidikan politik itu sendiri, dimana pada implementasi program pendidikan ini dapat menentukan kebijakan pendidikan politik yang dibuat oleh pemerintah melalui Bakesbangpol yang benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan sebuah output dan outcomes seperti yang telah direncanakan."

Mengacu dari teori Edwards bahwasanya keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya ialah disposision (sikap pelaksana) dimana kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan sangat penting dalam mewujudkan implementasi program pendidikan politik yang sesuai dengan tujuannya.

Implementasi merupakan turunan dari kebijakan publik, dimana pada saat implementasi ini sedang berlangsung kita dapat mengetahui secara langsung proses pelaksanaan program pendidikan politik ini. Implementasi sendiri merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan politik dengan cara langkah administratif maupun dengan politik itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi pendidikan politik sebetulnya dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata, sehingga nantinya dapat melanjutkan atau mengoperasionalkan program-program pendidikan politik yang telah dirancang sebelumnya.

Implementasi dalam program pendidikan politik merupakan tahap penting dalam kebijakan pendidikan politik itu sendiri, dimana pada implementasi program pendidikan ini dapat menentukan kebijakan pendidikan politik yang dibuat oleh pemerintah melalui Bakesbangpol yang benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan sebuah output dan outcomes seperti yang telah

direncanakan. Output disini merupakan keluaran atau hasil yang didapatkan dari kebijakan pendidikan politik. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Sedangkan Outcomes merupakan dampak yang didapat dari sebuah kebijakan, outcomes ini diharapkan dapat terlihat setelah keluarnya output dari kebijakan. Outcomes dapat diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Implementasi juga merupakan suatu proses yang sangat penting dan vital dalam sebuah kebijakan pendidikan politik. Karena dalam implementasi ini kita langsung berhadapan dengan penerima kebijakan pendidikan politik tersebut yaitu generasi muda. Generasi muda saat ini tentunya sangat membutuhkan pengetahuan tentang pentingnya politik bagi kehidupan nantinya. Pendidikan politik menjadi sarana pembentukan karakter bagi generasi muda, penanaman nilai-nilai pancasila yang tentunya sangat penting ditanamkan sejak dini. Namun dalam prakteknya, pendidikan politik sebetulnya sudah didapatkan sejak usia dini yaitu pada saat pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sebenarnya sudah dirancang untuk sosialisasi politik.

Dalam implementasi program pendidikan politik ini, terdapat tiga tujuan dari pembangunan pendidikan politik pertama, membentuk kepribadian politik, kedua kesadaran politik, ketiga partisipasi politik. Suatu sikap dari individu terhadap suatu permasalahan politik dapat menentukan tingkat kesadaran politik dari individu itu sendiri, hal ini dapat dilihat melalui tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu dalam permasalahan politik, sehingga individu tersebut mampu memposisikan dirinya sendiri dari kondisi tersebut dalam segala proses politik maupun demokrasi di negaranya. Semangat demokrasi dari generasi muda akan berkolerasi pada kualitas demokrasi dan produk demokrasi di negaranya.

Akan tetapi temuan dilapangan membuktikan bahwa program kegiatan pendidikan politik yang menjadi kebijakan dari Bakesbangpol Kabupaten Belitung Timur tidak terdapat tindak lanjut dalam mewujudkan visi misi serta tujuan diadakannya program pendidikan politik tersebut. Dalam hal ini pelaksana kebijakan atau implementator dari pendidikan politik harus mempunyai kejujuran serta komitmen yang kuat dalam mensukseskan implementasi program pendidikan politik ini. Bila dilihat, faktor yang menentukan dalam kesuksesan pelaksanaan program pendidikan politik ini adalah generasi muda itu sendiri selaku penerima kebijakan pendidikan politik.

Persoalan-Persoalan dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik. Hasil wawancara. Pertanyaan: Apakah ada persoalan-persoalan yang terdapat dalam pelaksanaan program pendidikan politik ini? Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik: "Sebetulnya dalam proses pelaksanaan pendidikan politik sendiri masih terdapat persoalan-persoalan yang belum dapat diatasi secara tepat dan benar. Persoalan-persoalan tersebut tentunya menghambat proses pelaksanaan pendidikan politik dan berpengaruh terhadap tingkat semangat generasi muda dalam berpolitik maupun dalam berdemokrasi. Persoalan-persoalan tersebut berupa kurangnya semangat generasi muda. Generasi muda saat ini cenderung memilih cuek dan tidak peduli terhadap segala perkembangan politik di Indonesia. Masalah yang dihadapi generasi muda pada saat ini yaitu masih adanya rasa takut dalam dirinya untuk bergabung atau ikut berpartisipasi dalam partai politik. Persoalan kedua adalah peran pemerintah yang dinilai masih kurang. Peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan politik sebetulnya belum maksimal karena masih terdapat minimnya fasilitas yang diberikan pada saat pelaksanaan pendidikan politik. Minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan pendidikan politik sendiri dirasa kurang optimal. Hal ini menyebabkan semangat generasi muda dalam proses demokrasi menurun, hal ini menjadi sebuah kegagalan pemerintah dalam memberikan pendidikan politik.

Menurut teori George Edward III (1980), tidak berjalan dengan suksesnya suatu kebijakan atau inefektifitas implementasi kebijakan publik biasanya dikarenakan kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga dalam pemerintahan maupun koordinasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dari pendidikan politik ini. Pendidikan politik memang perlu dilaksanakan

secara merata kepada seluruh masyarakat dan juga generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Namun dalam proses pelaksanaan pendidikan politik sendiri masih terdapat persoalan-persoalan yang belum dapat diatasi secara tepat dan benar. Persoalan-persoalan tersebut tentunya dapat menghambat proses pelaksanaan pendidikan politik dan pastinya akan berpengaruh terhadap tingkat semangat generasi muda maupun masyarakat dalam berpolitik maupun dalam berdemokrasi.

Persoalan-persoalan tersebut meliputi berikut: pertama, kurangnya Semangat Generasi Muda. Semangat generasi muda dalam berdemokrasi saat ini memang sangat kurang. Generasi muda saat ini cenderung memilih cuek dan tidak peduli terhadap segala perkembangan politik di Indonesia. Sehingga hal ini dapat menyebabkan permasalahan yang harus diatasi secara cepat dan serius oleh pemerintah saat ini. Masalah yang dihadapi generasi muda pada saat ini yaitu masih adanya rasa takut dalam dirinya untuk bergabung atau ikut berpartisipasi dalam partai politik. Hal ini dapat menyebabkan mainsheet buruk dikalangan generasi muda mengenai partai atau politik yang belum mengetahui secara penuh politik itu seperti apa. Faktor orang tua juga tidak dapat dipungkiri, adanya tekanan dari orang tua yang melarang anaknya untuk ikut berpartisipasi dalam politik (Malihah et al., 2020). Dari hal tersebut, kita dapat mengenyahui bahwa politik sendiri ibarat boomerang yang harus mereka hindari. Banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak politisi serta kepala daerah juga berpengaruh terhadap tingkat semangat masyarakat atau generasi muda dalam segala proses demokrasi di negeri ini.

Bentuk kepedulian generasi muda terhadap proses politik maupun demokrasi saat ini hanya pada isu-isu politik dalam negeri yang sedang hangat saja. Apabila hal ini tidak dibarengi dengan pendidikan, tentunya akan dapat menyebabkan semangat demokrasi di kalangan generasi muda menurun. Semangat generasi muda ini diharapkan dapat diterapkan dalam segala proses politik yaitu dengan mengikuti segala proses demokrasi dan politik di negaranya seperti dalam Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah.

Kedua, Kurangnya Peran Pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyelenggara pendidikan politik juga harus ikut mensukseskan program sehingga tercapainya tujuan dari pendidikan politik yang diharapkan. Keterlibatan pemerintah tidak hanya dalam membuat dan melaksanakan program pendidikan politik saja, namun pemerintah disini juga harus berperan sebagai pendamping dari program pendidikan politik kepada generasi muda. Peran pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan politik sebetulnya belum maksimal karena masih terdapat minimnya fasilitas yang diberikan pada saat pelaksanaan pendidikan politik. Minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah mengakibatkan pendidikan politik sendiri dirasa kurang optimal. Hal ini menyebabkan semangat generasi muda dalam proses demokrasi menurun, hal ini menjadi sebuah kegagalan pemerintah dalam memberikan pendidikan politik. Belum adanya kerjasama antara instansi pemerintah dengan instansi pendidikan juga menyebabkan tingkat semangat demokrasi generasi dalam berdemokrasi masih rendah. Instansi pendidikan menjadi wadah yang sangat menjanjikan, dikarenakan mayoritas generasi muda berada dalam instansi pendidikan baik sekolah menengah atas serta perguruan tinggi.

Simpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data pada bab sebelumnya, Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur masih terdapat berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya peran dari pemerintah terkait fasilitas yang diberikan dalam pendidikan politik membuat tingkat semangat demokrasi dari kalangan generasi muda rendah. Pelaksanaan pendidikan politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur masih menggunakan sosialisasi dalam melaksanakan programnya. Tentu hal ini merupakan cara lamban yang dilakukan oleh pemerintah, karena pada dasarnya model sosialisasi cenderung hanya sebagian orang saja yang mendapatkan informasi tentang mengenai pendidikan politik. Dalam hal ini diperlukan keseimbangan dari informasi yang modern dalam menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan generasi muda saat ini, sehingga informasi tersebut dapat

tersampaikan keseluruh kalangan generasi muda. Kendala program terjadi di internal maupun eksternal, baik dari pelaksana yaitu pemerintah dan generasi muda sebagai penerima kebijakan pendidikan politik. Program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh pemerintah belum mampu dimaksimalkan secara penuh dalam meningkatkan semangat demokrasi generasi muda. Pemerintah melaksanakan pendidikan politik dengan cara sosialisasi ternyata belum dapat menciptakan sebuah inovasi dalam perubahan model sosialisasi digital (media sosial). Kendala lain juga terdapat di eksternal generasi muda, yang belum mampu memberikan sebuah tanggung jawab sebagai warga negara dalam segala proses demokrasi di negaranya. Meski demikian, tanggung jawab dalam menambah ilmu pengetahuan tentang pendidikan politik harus dilaksanakan sesuai dengan rasa nasionalisme yang tinggi, hal tersebut membuat generasi muda harus memiliki keaktifan dalam mencari sumber informasi pendidikan politik. Kendala pelaksanaan pendidikan politik baik dari pemerintah sebagai pelaksana (internal) dan generasi muda penerima kebijakan (eksternal), semuanya mempunyai tugas masing-masing, sehingga diperlukan koordinasi dan dukungan dari generasi muda dalam merespon semua upaya pemerintah dalam pendidikan politik yang sudah lakukan. Disisi lain pemerintah juga harus dapat berkordinasi dalam memberikan suatu perbedaan dengan cara turun langsung ke sekolah maupun perguruan tinggi yang mayoritas dari generasi muda berada di dunia pendidikan.

Referensi

- Affandi, F. N. (2018). Pelaksanaan Program Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Anggraeni, L., Anggraeni, L., Affandi, I., Wahyudin, D., Paramitha, S. T., & Gilang, M. (2022). Optimization of the Board Game as a Platform for the Concept of Peace Education : A Survey Method Study To cite this article : method study . International Journal of Education in Mathematics , Science , and Technology Optimization of the Board Game as a .
- Anggraeni, L., Darmawan, C., & Tanszil, S. W. (2020). The Use of Comic-Based Technology: Media Cultivation of Values in the Nation Defense. 418(Acec 2019), 428–431. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.081>
- Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanszil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 138–147. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377>
- Bano, A. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terhadap Hasil Belajar Siswa di SMP Katolik Marsudisiwi Malang. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 61-65.
- Budiarjo, Miriam, 1981. Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Gultom, Andri, "Keracunan Sains dan Obat Penawarnya," Researchgate, 2022<https://www.researchgate.net/publication/363207278_Keracunan_Sains_dan_Obat_Penawarnya>
- Haerani, D. (2022). Program Sekolah Santun: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pembiasaan Jaga Lisan. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 42-53.
- Hoar, Y., Aji, S. D., & Kurniawati, M. (2022). Implementasi Metode Pembelajaran Edutainment Berbasis Media Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar Siswa. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 1-5.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1144.
- Leo Agustino, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia ? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373>
- Moleong, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ni'mah, A. C. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Budaya pada Pembelajaran PPKn Berbasis Value In Depth di Sekolah Menengah Pertama. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 18-22.

- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Anggraeni, L., Noviyanti, M., Ilsa, F., Gilang Ramadhan, M., Maharani, A., & Kodrat, H. (2021). Analysis and evaluation of law number 12 of 2012 concerning higher education based on sports needs for students. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 191–199. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/42249>
- Paramitha, S. T., Hasan, M. F., Ilsa, M. N. F., Anggraeni, L., & Gilang Ramadhan, M. (2021). Level of physical activity of Indonesian esport athletes in the piala Presiden esport 2019. *Jurnal SPORTIF : Jurnal Penelitian Pembelajaran*, 7(1), 71–83. https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v7i1.15642
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022a). Implementation of Healthy Gymnastics and Use of Technology as an Effort to Maintain Body Immunity during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(2), 328–340. <https://doi.org/10.46328/IJEMST.2290>
- Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022b). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 10(1), 132–144. <https://doi.org/10.46328/ijemst.2165>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 51-59.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Supandi, E. L. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Peta Pikiran (Mind Mapping) untuk Meningkatkan Pemahaman Konseptual. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 54-62.
- Suryana, G. A. (2022). Penerapan Aplikasi Kahoot! sebagai Media Pembelajaran Berbasis Teknologi pada Mata Pelajaran PPKn. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(2), 35-41.
- Tuasamu, K. A. (2022). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai Dasar Pendidikan Karakter dalam Ruang Pribadi, Sosial dan Lingkungan untuk Kemajuan Bangsa. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 6-10.
- Vidianditha, K. R. (2019). Pentingnya Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Untuk Meningkatkan Partisipasi Terhadap Pemilihan Umum Dalam Membangun Demokrasi. In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(1), pp. 251-257).